



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HANNAN BUDIHARTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL**
3. NHK : **138182**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.950.000.000**

1. Tanah Seluas 257 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 254 m2/70 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 2780 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 3.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
7. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL
SENDIRI Rp. 800.000.000
8. Tanah Seluas 504 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL
SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 624.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V/2019 MINIBUS Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000



2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS 1.5L PLUS 4X2 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. LAINNYA, BROMPTON M6L Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	608.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	57.644.024
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	8.239.644.024
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.239.644.024

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.